

Kepentingan Iran dalam Upaya Mendapatkan Keanggotaan
Tetap di Shanghai Cooperation Organisation (SCO)

Oleh:

Insan Qurani

(insanqurani11@gmail.com)

Pembimbing : Sidiq Ahmadi, S.IP., M.A

Jurusan Hubungan Internasional – Prodi Ilmu Hubungan
Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl. Ringroad Barat, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta 55184

Abstrac

This research aims to understand the interests of Iran to obtain full membership status in Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in Hassan Rouhani era (2013-2018). This Iran foreign policy began from “Look to the East” policy in Mahmoud Ahmadinejad era, and as time goes by Iran in Hassan Rouhani era shows its desire to obtain full membership status in Shanghai Cooperation Organisation. The author uses the content analysis method by collecting information related to refetence sources were taken from book, journals, and internet.

This research shows that the national interest factor is the most influential determinant in Iran foreign policy. Hassan Rouhani’s decision to to obtain full membership in Shanghai Cooperation Organisation (SCO) is driven by two fators, which are the national economic interest and state autonomy interest.

Keywords: Iran, Shanghai Cooperation Organisation, Hassan Rouhani, National Interest

Pendahuluan

Pasca Revolusi Iran 1979, hubungan Iran dengan Amerika Serikat memburuk. Amerika Serikat pertama kali menjatuhkan sanksi terhadap Iran pada 1980, dimana Washington memberlakukan embargo ekonomi sebagai tanggapan pendudukan kedutaan Amerika Serikat di Teheran. Keadaan hubungan keduanya diperparah dengan isu sengketa nuklir Iran dan perang Iran-Irak. Amerika Serikat yang sebelumnya mendukung penuh program pengayaan uranium pada 1960-an, kemudian berbalik mengecam Iran. Iran dianggap telah melanggar perjanjian non-proliferasi senjata nuklir yang telah ditandatanganinya pada 1 Juli 1968. Pengayaan uranium Iran dituding bukan untuk tujuan produksi energi namun untuk menciptakan senjata nuklir. Kemudian ketika Amerika Serikat berada pada masa pemerintahan Bill Clinton tahun 1995, Amerika Serikat melakukan embargo total terhadap Iran. Clinton memberikan instruksi kepada perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang beroperasi di Iran untuk mencabut saham atau investasinya dan pergi dari tanah Persia. (Madjid, 2013, p. 954) Kecurigaan Amerika Serikat kepada Iran terus berlanjut termasuk pada masa Presiden George W. Bush yang juga menganggap pengembangan nuklir Iran berpotensi menjadi pengembangan senjata nuklir.

Sikap Iran dinilai tidak kooperatif membuat negaranya didatangi oleh *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk melakukan inspeksi terhadap pengayaan nuklir di Iran. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun hingga tahun 2002, IAEA mendapat informasi bahwa terdapat beberapa kejanggalan dari aktivitas pengayaan yang dilakukan Iran serta adanya sebuah situs pengembangan nuklir, yakni situs Parchin yang belum teridentifikasi statusnya. Hal ini dikarenakan situs tersebut berada dalam penjagaan ketat oleh pihak militer Iran sehingga IAEA tidak mendapatkan izin

melakukan inspeksi ke dalamnya. (Bhimantra, Fasisaka, & Parameswari, 2016) Sikap Iran yang tidak mau bekerjasama dengan IAEA dalam inspeksinya membuat Amerika Serikat membujuk Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi terhadap program nuklir Iran. Di bawah tekanan internasional, pada 2003 alhasil Iran mengumumkan kesediannya untuk menghentikan secara penuh program pengayaan uranium. Belum genap satu tahun sejak Iran menandatangani protokol tambahan perjanjian non-proliferasi, pada Juni 2004 Iran melanggar batas waktu yang ditetapkan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk menyerahkan informasi terkait program nuklirnya.

Iran tetap terus melakukan pengayaan uranium hingga pada puncak sengketanya di masa kepemimpinan Mahmoud Ahmadinejad. Ahmadinejad yang memegang jabatan presiden Iran sejak 2005 hingga 2013 justru meningkatkan produksinya, Iran melakukan pengayaan uranium hingga mencapai 20%. Angka tersebut jauh melebihi kesepakatan dalam perjanjian Non-Poliferasi yang seharusnya setiap negara hanya boleh memiliki 5% dari pengayaan uranium untuk bahan dasar tenaga nuklir. Pada tahun 2006, IAEA kembali melakukan inspeksi kepada Iran. Dari hasil inspeksi tersebut Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi mengenai program nuklir Iran. (Kasmin, 2015, p. 158) Ahmadinejad pun hingga akhir masa jabatannya terus menolak untuk menyepakati perjanjian nuklir yang dinegosiasikan oleh negara-negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Bahkan Ahmadinejad dan Amerika Serikat seringkali melakukan aksi saling kecam di depan publik.

Mencoba bertahan di tengah serangkaian sanksi internasional yang diberikan kepada Iran, Ahmadinejad menjalankan kebijakan "*Look to the East*". Kebijakan untuk berkiblat ke Timur ini diambil karena Ahmadinejad percaya hubungan luar negeri dengan negara-negara non-Barat yang

bisa menerima semangat revolusi Iran dapat menjadi alternatif lain untuk mengimbangi Barat. (Amuzegar, 2005, p. 49) Salah satu agenda dari “*Look to the East*” dalam kebijakan luar negerinya, Iran mulai melirik organisasi regional non-Barat yaitu *Shanghai Cooperation Organisation* (SCO).

SCO merupakan reinkarnasi dari *Shanghai Five*, yang didirikan pada tahun 1996 oleh lima negara, yaitu China, Rusia, Kazakhstan, Kyrgyzstan dan Tajikistan. Tujuan awal didirikannya forum Shanghai Five adalah untuk meminimalisir konflik perbatasan yang terjadi antar negara. Kemudian forum ini memperluas kerjasama tidak hanya dalam stabilitas regional tetapi juga kerjasama ekonomi. Shanghai Five melakukan transformasi menjadi forum kerjasama internasional SCO pada tahun 2001 ditambah dengan bergabungnya Uzbekistan. Selain dari negara-negara anggota tetap SCO, organisasi ini juga menggandeng beberapa negara sebagai *observer countries* dan negara lainnya sebagai dialog partner.

Iran untuk pertama kalinya bergabung dengan SCO pada masa pemerintahan presiden Ahmadinejad tahun 2005 dengan status negara pengamat. Dengan diterimanya Iran sebagai pengamat SCO, dan partisipasinya mendapat respon baik dari negara-negara anggota SCO, Iran kemudian mencoba untuk melangkah menjadi anggota tetap SCO. Pada 15 Juni 2006, presiden Ahmadinejad dalam konferensi tingkat tinggi SCO di Shanghai mengekspresikan keinginannya untuk menjadi anggota tetap SCO. Pada tahun 2008 Iran secara resmi mendaftarkan negaranya sebagai anggota tetap melalui prosedur formal yang ditetapkan SCO. (Khodaei, 2013, p. 188) Namun permintaan Iran saat itu belum ditanggapi oleh SCO.

Keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap rupanya tersandung peraturan yang dikeluarkan SCO terkait syarat

negara anggota tetap. Kriteria yang diumumkan SCO pada tahun 2010 memuat larangan untuk menjadi anggota tetap bagi negara yang sedang berada dibawah sanksi internasional. Peraturan tersebut menjadi sandungan bagi Iran karena saat itu Iran telah mendapat sanksi oleh PBB yang juga disahkan termasuk oleh Rusia dan Tiongkok. Iran mendapatkan sanksi oleh PBB melalui beberapa resolusi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB terkait aktivitas nuklirnya.

Setelah masa kepemimpinan Ahmadinejad berakhir, keinginan Iran untuk menjadi anggota tetap di Shanghai Cooperation Organization terlihat makin serius. Di bawah kepemimpinan Hassan Rouhani, Iran melakukan pendekatan yang berbeda dibandingkan Ahmadinejad. Arah kebijakan politik luar negeri yang ditawarkan Rouhani sejak menjabat pada 2013 hingga saat ini adalah Iran yang moderat dan meredakan ketegangan dengan Barat. Rouhani menyatakan ingin lebih banyak transparansi dalam program nuklir Iran untuk membangkitkan kepercayaan dunia. Saat menghadiri KTT SCO Rouhani menyatakan kesediaan dan komitmennya untuk tidak menggunakan dan mengembangkan senjata nuklir. (Weitz, 2015) Sikap Iran di masa Rouhani dinilai tidak begitu berbahaya dan berperilaku baik dalam pengembangan nuklirnya. Hal ini yang memperbesar kemungkinan penghapusan sanksi yang dijalani oleh Iran. Rencana pelepasan sanksi internasional tersebut juga didukung oleh negara-negara anggota SCO.

Kesempatan Iran bergabung dengan SCO semakin besar ketika Iran, Dewan Keamanan PBB dan Jerman akhirnya menyepakati sebuah kesepakatan bersama yang disebut *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) pada 14 Juli 2015 . Iran berjanji untuk mengizinkan pemantau internasional untuk memeriksa fasilitas nuklirnya dan langkah-langkah lain yang dirancang untuk menjamin bahwa kegiatan energi nuklirnya adalah murni untuk tujuan damai.

(Tempo.co, 2015) Iran akan membatasi program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi ekonomi yang sebelumnya diterapkan oleh PBB, Uni Eropa, dan Amerika Serikat.

Hanya berselang 3 tahun dari pencapaian Rouhani yang membuka peluang damai dengan negara-negara yang menentang program nuklirnya, lagi-lagi Iran harus menghadapi tekanan dari Amerika Serikat. Pada Mei 2018 Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengumumkan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Kemudian Trump mengumumkan penerapan kembali sanksi terkait nuklir kepada Iran pada 6 Agustus 2018. Tindakan tersebut termasuk memberlakukan kembali sanksi terhadap sektor otomotif, perdagangan emas, logam mulia, sektor energi, transaksi minyak, lembaga keuangan asing dengan Bank Sentral Iran, dan sebagainya (Kompas.com, 2018). Negara-negara yang menyepakati perjanjian nuklir Iran termasuk negara-negara anggota Shanghai Cooperation Organisation seperti Rusia dan China menyangkan keputusan Amerika Serikat. Rouhani menegaskan bahwa Uni Eropa bersama China dan Rusia harus membuat aksi nyata untuk menyelamatkan perjanjian nuklir tersebut.

Hasil Penelitian

Dibentuk pada tahun 2001, SCO dapat dikatakan sebagai salah satu organisasi regional yang cukup baru dalam lingkungan internasional. Meskipun tergolong baru, SCO memiliki potensi di bidang politik, militer, dan ekonomi yang kuat. Dengan kawasannya yang cukup luas, yakni mencakup Eropa, Asia Tengah, dan Asia Timur. Wilayah anggota SCO mencakup 3/5 daratan Eurasia. Jumlah populasi negara anggota SCO mencapai milyaran dan bila ditambah dengan jumlah populasi negara observer, maka SCO hampir mencapai setengah dari jumlah penduduk dunia. (Putten, 2007, p. 5) Apalagi setelah masuknya India dan Pakistan sebagai anggota SCO yang semakin memperluas wilayah

kerjasamanya. Potensi-potensi itulah yang membuat Hassan Rouhani terus melakukan upaya untuk mendapatkan keanggotaan tetap di SCO. Keseriusannya diperlihatkan dengan upaya damai Iran dengan Amerika Serikat dan dunia internasional untuk menyudahi sengketa nuklir Iran dan mencapai JCPOA. Dengan membawa kesan perdamaian, rangkaian sanksi internasional yang diberikan terhadap Iran selama bertahun-tahun akhirnya dicabut. Hal ini mampu mempermudah Iran mendapat posisi *full membership* di SCO.

1. Kepentingan Ekonomi

Bagi Iran, SCO merupakan rekan kerjasama yang tepat baginya karena SCO bukanlah organisasi yang dipengaruhi oleh Barat. Sehingga, membuka kerjasama dengan SCO merupakan solusi yang tepat untuk meringankan dampak atas sanksi yang diterimanya. (Akbarzadeh, 2014) Ekonomi Iran mendapat dampak buruk akibat beragam sanksi yang diterapkan PBB selama bertahun-tahun yang mengakibatkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus. Pada masa pemerintahannya, Rouhani menjanjikan kabinetnya akan mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan perekonomian, menghidupkan lagi etika dan interaksi dengan dunia internasional melalui kebijakan yang moderat. (Press TV, 2013) Maka masuknya SCO dalam salah satu daftar kebijakan luar negeri Iran menjadi agenda pemenuhan kebutuhan nasional Iran yang berusaha dicapai Rouhani. Rouhani juga berusaha untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tetangga, termasuk Asia Tengah, dengan tujuan untuk mengatasi hambatan yang ada dan untuk mencari peningkatan potensi kedua belah pihak di hal perdagangan, investasi, dan pengaruh timbal balik.

(Parkhomchik, 2016, p. 4) Dengan demikian, strategi ini harus menekankan pada pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar.

Kerjasama-kerjasama tersebut dapat diperluas dan dipererat melalui SCO, sebagai organisasi yang memiliki peran kerjasama multilateral termasuk di bidang ekonomi. SCO menjadi platform yang dituju Rouhani guna ikut membenahi kondisi ekonomi Iran. Kerjasama ekonomi SCO dapat memberikan perubahan baik dalam bidang kerjasama investasi, maupun pembangunan infrastruktur di negara – negara anggota SCO. Dasar berdirinya SCO dapat dilihat pada *SCO Charter* yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni, 2002. Dokumen dimaksud menyebutkan tujuan utama didirikannya SCO adalah untuk memperkuat hubungan persahabatan, rasa saling percaya, dan mendorong kerja sama yang efektif di bidang politik, ekonomi, ilmiah, budaya, pendidikan, listrik, transportasi, dan ekologi antar negara anggota. (Kemlu, 2016, p. 22) Prinsip dasar inilah yang membuat peran SCO mampu mendorong kemajuan perekonomian Iran sekaligus mendapat dukungan secara politik.

Dalam perkembangan terbarunya, Iran ikut serta dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) SCO yang ke-18 pada 8-9 Juni 2018. KTT tersebut menghasilkan beberapa memorandum terkait kerjasama antar negara. Kerja sama ekonomi negara-negara SCO dalam deklarasi tersebut menjadi perhatian utama. Negara anggota berencana untuk menggunakan mata uang nasional dalam aktivitas perdagangan dan investasi. Para peserta KTT SCO juga menandatangani memorandum terkait perluasan kerja sama di bidang usaha mikro, kecil, dan

menengah, termasuk di bidang pariwisata. (Filippov, 2018)

Negara - negara anggota SCO juga memiliki arti penting bagi Iran. Seperti Tiongkok, yang secara historis tidak memiliki hubungan politik yang rumit ataupun memiliki konflik atas kedua pihak. Kepentingan Tiongkok terhadap negara – negara di Timur Tengah lebih kepada kepentingan ekonomi dan perdagangan dibandingkan kepentingan politis. Sejak lama Iran memiliki kedekatan ekonomi dengan anggota utama SCO ini. China sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia telah menjadi mitra dagang utama Iran, termasuk kerjasama impor minyak. (Khodaei, 2013, p. 194) Apalagi pada 2017, China menjadi importer minyak terbesar di dunia mengalahkan Amerika Serikat. (OBOReuropa, 2018)

Dalam perkembangan kerjasamanya, ratusan perusahaan China telah beroperasi di Iran untuk pengembangan pelabuhan dan bandara di kota-kota besar Iran. Kerjasamanya juga merambah bidang energi, termasuk listrik, bendungan, pabrik semen, pabrik baja, jalur kereta, pembuatan kapal, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Bahkan ketika beberapa negara Eropa membatalkan kerjasama dengan Iran akibat adanya tekanan dari Amerika, China merupakan salah satu negara yang mengisi kekosongan kerjasama tersebut. (Lei, 2010)

Menurut Valiollah Seif, Gubernur Bank Sentral Republik Islam Iran, meskipun tekanan besar dan sanksi yang dikenakan dalam periode pasca JCPOA, bank-bank dan perusahaan-perusahaan Cina masih melakukan kerjasama sangat baik dengan mitra-mitranya dari Iran. Mereka telah menandatangani banyak kontrak antara bank dan

lembaga keuangan serta pihak-pihak pebisnis dari kedua negara sekaligus implementasinya. (ParsToday, 2018) Kerjasama ekonomi China dan Iran justru terus menguat setelah Trump mengumumkan Amerika Serikat menarik diri dari JCPOA dan kembali menerapkan sanksi kepada Iran. Misalnya, BUMN sektor energi terbesar asal China, CNPC, membenamkan investasi di proyek [migas](#) Iran. Kantor berita Pemerintah Iran, IRNA melaporkan, investasi miliaran dolar AS itu menggantikan posisi perusahaan migas asal Prancis, Total. Sebelumnya Total telah menandatangani kontrak pada 2017, untuk mengembangkan ladang gas alam South Pars tahap II, dengan kontrak senilai 1 miliar dolar AS. Tapi komitmen investasi itu tak berlanjut, karena terhadap sanksi ekonomi Amerika Serikat terhadap Iran pasca Trump keluar dari JCPOA. (Kumparan, 2018)

Kemudian dalam hubungan Iran – Rusia yang pada awalnya sangat kompetitif berubah menjadi kooperatif dengan adanya kerjasama energi yang diinisiasi oleh Rusia pada KTT SCO yang bernama *Energy Club* dan melibatkan Iran sebagai *observer* didalamnya. Hal ini menjadi kekuatan pendorong meningkatnya hubungan dengan Rusia-Iran (Finucane, 2016). Pembentukan *Energy Club* yang diratifikasi pada KTT SCO di Astana tahun 2006, bertujuan untuk mengkoordinasikan kebijakan – kebijakan tentang perdagangan energi, meningkatkan kerjasama ekonomi antar negara anggota dan beradaptasi dengan ekonomi global.

Iran sebagai salah satu produsen minyak terbesar di dunia, yang juga dipandang sebagai saingan Rusia dalam produksi minyak berubah menjadi rekan Rusia dalam produksi minyak dan gas bumi. Iran dan Rusia memiliki sekitar setengah

cadangan gas bumi dan keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam menjaga harga gas pada level tinggi. (Khodae, 2013, p. 194) Selain itu Rusia menekankan akan terus menghormati perjanjian nuklir dengan Iran yang tertuang di JCPOA.

Bahkan meski adanya tekanan Amerika Serikat, keduanya terus meningkatkan kerjasama perdagangan. Pada 17 Mei 2018 Iran menandatangani perjanjian zona perdagangan bebas dengan Eurasia Economic Union (EEU). Perjanjian tersebut terkait penurunan atau penghapusan bea cukai dan memulai proses kerjasama perdagangan secara permanen selama tiga tahun kedepan. Kesepakatan tersebut dilaksanakan guna memperluas perputaran perdagangan senilai USD 2.7 miliar antara Iran dan EEU, yang meliputi Rusia, Armenia, Belarus, Kazakhstan dan Kyrgyzstan. (The Moscow Times, 2018)

Kemudian peran Asia Tengah, merupakan salah satu kawasan yang mempunyai arti penting bagi dunia internasional. Kawasan yang terdiri dari enam negara pecahan Uni Soviet, yakni Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan, merupakan kawasan yang mempunyai cadangan kekayaan energi dan mineral yang melimpah. Kawasan ini memiliki sejumlah cadangan minyak, gas alam, batu bara, dan uranium serta mempunyai potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan.

Seperti Azerbaijan yang diperkirakan memiliki cadangan minyak mencapai 7 miliar barel yang merupakan terbesar ke-20 dunia dan 1,1 triliun meter kubik cadangan gas alam yang merupakan terbesar ke-27 dunia. Kazakhstan memiliki cadangan minyak mencapai 30 miliar barel yang merupakan

terbesar ke-12 dunia dan cadangan batu bara mencapai 33,6 miliar ton yang merupakan terbesar ke-8 dunia. Turkmenistan diperkirakan memiliki cadangan gas alam mencapai 17,5 triliun meter kubik yang merupakan terbesar ke-4 dunia. (BP Statistical Review of World Energy June 2016) Dalam hal cadangan Uranium, Kazakhstan dan Uzbekistan masing-masing mempunyai 679,300 ton dan 91,300 ton uranium yang merupakan terbesar ke-2 dan ke-13 dunia. (Kemlu, 2016, p. 1) Kekayaan dan potensi ekonomi Asia Tengah juga ditunjang dengan letak strategis kawasan tersebut yang merupakan penghubung kawasan di sekitarnya. Daratan Asia Tengah memainkan peran penting dalam perdagangan dunia dengan menjadi jembatan antara kawasan Asia Pasifik dan Eropa sebagai alternatif transportasi laut melalui Samudra Hindia. Hal ini tidak mengherankan, mengingat Asia Tengah sejak jaman dahulu kala merupakan jalur utama lalu lintas perdagangan dan kebudayaan dunia atau “Jalur Sutra”. Dengan potensi ekonomi yang dimiliki dan letaknya yang strategis, Asia Tengah menarik perhatian sejumlah negara-negara adidaya dunia dan kawasan, seperti AS, Rusia, UE, Tiongkok, Iran, dan negara lainnya. Sehingga kepentingan utama Iran di Asia Tengah tidak terlepas dari kerja sama ekonomi. Asia Tengah merupakan pasar yang potensial bagi Iran. Sebaliknya, Iran juga dipandang sebagai mitra yang teramat penting bagi negaranegara di Asia Tengah. (Kemlu, 2016, p. 114)

Pasca berakhirnya Perang Dingin yang diikuti kemerdekaan negara-negara di kawasan tersebut, Asia Tengah yang memiliki posisi yang strategis tetap menjadi ajang perebutan pengaruh dan kekuasaan negara-negara besar. Tidak hanya Rusia, namun juga

termasuk Iran. Upaya Iran untuk hadir di Asia Tengah salah satunya didorong oleh banyaknya kesamaan kedua kawasan ini. Iran secara historis, geografis, kepercayaan, dan kebudayaan memiliki kedekatan tersendiri dengan Asia Tengah. Upaya Iran untuk meningkatkan kehadirannya di kawasan Asia Tengah sebenarnya cukup sukses pada era Rafsanjani, namun karena isu terorisme dan ketakutan Asia Tengah dianggap Islam yang fundamental, Asia Tengah memilih untuk lebih dekat dengan Rusia dan Turki pada saat itu (Khodae, 2013, pp. 194-195)

Arti strategis Asia Tengah bagi Iran juga dipengaruhi hubungan politik antara keduanya. Hal ini terutama penting di saat merebaknya politik sektarian di Timur Tengah dan Iran kini dicap sebagai musuh oleh sebagian negara besar di Timur Tengah. Kemitraan Iran dengan Asia Tengah dapat mendukung upaya negara tersebut melepaskan diri dari isolasi politik. Hubungan politik Iran dengan tetangganya di utara yang relatif lebih positif tersebut memberikan lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kerja sama ekonomi keduanya. Peningkatan kerja sama ekonomi Iran dan negarane-negara di Asia Tengah didorong oleh komitmen politik dari level tertinggi. Hal ini diantaranya terlihat dari kunjungan kenegaraan antara kedua pihak. Misalnya Presiden Turkmenistan berkunjung ke Iran pada 22-23 November 2016 dan menandatangani beberapa perjanjian, di antaranya di bidang perkapalan perdagangan, kesehatan dan ilmu kedokteran, pembangunan *power lines* antara Mary (Turkmenistan) dan Mashhad (Iran); serta peninjauan jalan raya Ashgabat - Turkmenabat. Sementara Kunjungan Presiden Kazakhstan ke Tehran pada 11-12 April 2016 menghasilkan penandatanganan 66

perjanjian bilateral senilai lebih dari USD 2 miliar. Kerja sama meliputi metallurgy, pertambangan, pertanian, transportasi dan logistik, pariwisata, iptek dan pendidikan, serta pengobatan. (Kemlu, 2016, p. 115)

2. Kepentingan Otonomi

Pencabutan sanksi internasional terhadap Iran sejak 2015 yang mulai membuka peluang Rouhani untuk lebih aktif di dunia Internasional kembali menghadapi tekanan Amerika Serikat. Dengan keluarnya Amerika Serikat secara sepihak dari JCPOA dan mulai menerapkan sanksi kepada Iran, dinilai dapat menghambat pembangunan ekonomi Iran. Presiden Donald Trump juga melontarkan peringatan keras kepada siapa pun yang melakukan perdagangan dengan Iran. (BBC, 2018) Maka dengan bergabung dengan SCO sebagai anggota tetap, Iran dapat memenuhi fungsi otonomi negaranya dalam menahan Tekanan Amerika Serikat terhadap Iran.

KTT SCO pada Juni 2018 menjadi kesempatan Rouhani untuk meminta dukungan dengan para petinggi negara anggota SCO. Rouhani memberikan pernyataan yang menyayangkan sikap Amerika Serikat karena menarik diri dari JCPOA, meskipun Iran telah mematuhi ketentuan JCPOA dan IAEA. Ia juga mengatakan bahwa semua negara yang menandatangani JCPOA bertanggung jawab atas komitmennya menjaga implementasi JCPOA dan menghapus sanksi internasional terhadap Iran, termasuk DK PBB. Sebagai hasil dari KTT tersebut, negara anggota SCO menyatakan dukungannya untuk terus mempertahankan dan menerapkan JCPOA. Negara anggota menyerukan agar pihak-pihak yang terkait dengan JCPOA untuk memastikan implementasi perjanjian tersebut secara penuh dan

efisien serta menyerukan perdamaian dan stabilitas global. (Tehran Times, 2018)

Maka jika Iran hadir sebagai negara anggota tetap di SCO, Iran dapat memperluas pengaruhnya guna mendapatkan dukungan dari negara-negara anggota SCO, termasuk dukungan melalui kerjasama ekonomi. Kelanjutan JCPOA sangatlah penting agar akses Iran ke dalam SCO tidak lagi terhambat. Adanya dukungan ini dapat memperbesar kemampuan Iran untuk memenuhi kepentingan nasionalnya dal hal otonomi negara. Sehingga Iran mampu menahan tekanan dari Amerika Serikat. Apalagi China dan Rusia memiliki pengaruh kuat sebagai anggota utama SCO sekaligus anggota DK PBB yang terikat dalam JCPOA.

Disamping ancaman Trump, Presiden Rusia dan Cina menekankan dukungan mereka atas kesepakatan nuklir Iran dan kelompok 5 +1 tersebut. Presiden Rusia, Vladimir Putin, dan Presiden China Xi Jinping, dalam pernyataan bersama setelah pertemuan KTT SCO di Beijing pada 8 Juni 2018 mengumumkan bahwa mereka akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk mempertahankan JCPOA. Apalagi Iran telah sepenuhnya memenuhi semua komitmen nuklirnya dalam kerangka JCPOA sesuai 11 laporan Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Dari sudut pandang Rusia, Trump terbukti menjadi mitra internasional yang tidak dapat dipercaya dengan tindakan anti-JCPOA. Mikhail Ulyanov, Duta Besar Rusia untuk IAEA mengatakan, Amerika Serikat bukan hanya tidak menghormati kesepakatan nuklir Iran dan keluar darinya, tetapi mencoba untuk mencegah pihak lain mengikuti perjanjian ini. Kemudian China sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia dan

memiliki hubungan ekonomi yang luas dengan Iran, telah berulang kali mengkritik tindakan Trump. China juga menekankan tetap melanjutkan kerjasama dengan Iran meskipun adanya tekanan Amerika Serikat. (ParsToday, 2018)

Sebelumnya, hubungan historis antara Iran dan Rusia yang sempat mengalami ketegangan pada tahun 1990an berubah menjadi kooperatif, khususnya dalam menangani isu hegemoni Amerika Serikat di wilayah Eurasia. Mereka saling memandang satu sama lain memiliki potensi geostrategis dalam politik luar negerinya. Hubungan Rusia-Iran pada akhirnya membaik sekitar beberapa tahun terakhir dan mulai terjalin kembali dalam kerangka SCO. Pada saat masuknya Iran sebagai negara pengamat, dan peran Iran yang sangat signifikan dalam mendukung program – program SCO nampaknya memperat hubungan Rusia-Iran hingga saat ini. Selain pada isu hegemoni Amerika Serikat di Eurasia, isu penanganan ‘*three evils*’ yang diangkat oleh SCO juga menjadi pemicu kedekatan hubungan Rusia-Iran. Hal ini memperlihatkan bahwa hubungan Rusia dan Iran telah memasuki fase baru dalam kerjasama militer yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam hubungan mereka sejak berakhirnya Perang Dunia II, walaupun beberapa akademisi menganggap bahwa hubungan Iran-Rusia hanya hubungan jangka pendek atau *ad-hoc*. (Geranmayeh, 2016, p. 186)

Selain itu, China dan Rusia memiliki peran besar di kawasan Asia Tengah. Terlebih lagi dengan adanya SCO yang turut serta dalam bidang ekonomi, politik, dan keamanan utama di kawasan Asia Tengah dan posisi ekonomi China sebagai mitra dagang serta pemberi pinjaman bagi negara di Asia Tengah. Dinamika pergeseran ini akan membuat Asia Tengah

kurang ramah bagi pengaruh Amerika Serikat dalam upaya pembangunan, integrasi ekonomi regional, dan promosi nilai-nilai Barat. (Stronski, 2016) Hal ini mampu membuat Iran lebih mudah menghadirkan eksistensinya di kawasan Asia Tengah.

Daftar Pustaka

- Akbarzadeh, S. (2014). Iran and the Shanghai Cooperation Organization : Ideology and Realpolitik in Iranian Foreign Policy. *Australian Journal of International Affairs*.
- Amuzegar, J. (2005). Iran's Third Development Plan: An Appraisal. *Middle East Policy Vol 12 No. 3*, 49.
- BBC. (2018, Agustus 7). Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-45097681>
- Filippov, A. (2018, Juni 15). Retrieved from <https://doc-research.org/2018/06/65128/>
- Finucane, M. (2016, July 19). *Russia Direct*. Retrieved from <http://www.russia-direct.org/opinion/beginning-russianiranian-alliance>
- Geranmayeh, E. &. (2016). The New Power Couple: Russia and Iran in The Middle East. London: European Council on Foreign Relations (ECFR).
- Kasmin. (2015). Upaya Iran Dalam Mengatasi Embargo Minyak Uni Eropa. *eJournal Ilmu Hubungan Internasional, vol. 3, no. 1*, 158.
- Kemlu. (2016). Kajian Mandiri: Indonesia dan Asia Tengah: Sebuah Upaya Penguatan. Retrieved from <https://www.kemlu.go.id/Buku/Kajian%20Mandiri%20Diplomasi%20Ekonomi%20Asia%20Tengah%20Januari%202017.pdf>
- Khodae, M. A. (2013). Iran and the Shanghai Cooperation Organization. *Iranian Review of Foreign Affairs, Vol.4, No. 1*.

- Kompas.com*. (2018, August 7). Retrieved from www.kompas.com:
<https://internasional.kompas.com/read/2018/08/07/08015381/trump-berlakukan-kembali-sanksi-untuk-iran-ini-dampaknya>
- Kumparan*. (2018, Agustus 12). Retrieved from <https://kumparan.com/@kumparanbisnis/abaikan-sanksi-as-bumn-china-investasi-di-proyek-migas-raksasa-iran-1533814983435185890>
- Lei, L. J. (2010). Key Issues in China-Iran Relations . *Institute for International Studies, Vol. 4, No.1*.
- OBOReuropa*. (2018, May 20). Retrieved from <http://www.oboreurope.com/en/new-silk-road-iran/>
- Parkhomchik, L. (2016). Modification of Iran's Foreign Policy Orientation in Central Asia. Retrieved from <https://cabar.asia/en/lidiya-parkhomchik-modification-of-iran-s-foreign-policy-orientation-in-central-asia/?pdf=4177>
- ParsToday*. (2018, June 9). Retrieved from http://parstoday.com/id/news/world-i58348-penekanan_rusia_dan_cina_untuk_tetap_mendukung_jcpoa
- Press TV*. (2013, June 17). Retrieved from <http://www.presstv.com/detail/2013/06/17/309475/rohani-vows-constructive-interaction/>
- Putten, M. d. (2007). The Shanghai Cooperation Organization Towards a Full-Grown Security Alliance?
- Stronski, R. S. (2016, January 25). Retrieved from <https://eurasianet.org/how-much-should-the-united-states-still-care-about-central-asia>

- Tehran Times*. (2018, June 10). Retrieved from <https://www.tehrantimes.com/news/424323/SCO-summiteers-back-full-implementation-of-JCPOA>
- Tempo.co*. (2015, July 20). Retrieved from www.tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/685209/dk-pbb-secara-bulat-setuju-sanksi-iran-dicabut/full&view=ok>
- The Moscow Times*. (2018, May 17). Retrieved from <https://themoscowtimes.com/news/iran-agrees-interim-free-trade-zone-with-russia-led-eurasian-union-61479>
- Weitz, R. (2015, August 5). *The Central Asia-Caucasus Analyst*. Retrieved from www.cacianalyst.org: <https://www.cacianalyst.org/publications/analytical-articles/item/13255-iran-and-sco-new-opportunities-new-challenges.html>